



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

MEDIA
Mercusuar

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	<input checked="" type="checkbox"/>	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	<input checked="" type="checkbox"/>	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	-------------------------------------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

Pemkot Inventarisasi Aset Kendaraan Dinas

TANAMODINDU, MERCUSUAR- Dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, maka Pemerintah Kota Palu meminta pejabat yang menggunakan kendaraan dinas yang telah berpindah dimasnya untuk mengembalikan kendaraan yang digunakan, untuk dilakukan inventarisasi kendaraan dinas yang ada.

Sekretaris Kota Palu (Sekkot), Asti dalam pertemuan terkait penertiban aset kendaraan itu, meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu menginventarisasi seluruh aset kendaraan roda dua lainnya, termasuk komputer dan laptop.

Hal tersebut menurutnya dilakukan untuk menyesuaikan jumlah aset berdasarkan OPD baru yang diatur dalam PP nomor 18 tahun 2016 tentang OPD. "Ini juga dalam rangka penertiban administrasi aset. Sebab jika tidak, ini akan menjadi unsur bagi BPK RI untuk tidak memberikan opininya atau disclaimer," kata Asti, Rabu (17/1/2017).

Asti juga meminta Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKD/SDMD) untuk menginventarisasi seluruh staf OPD untuk kepentingan penempatan staf, sebab saat ini sudah banyak staf berstatus pejabat fungsional umum.

Menurut Sekkot inventarisasi itu harus dilakukan secepatnya, bahkan kalau perlu staf di OPD bisa segera dibuahkan surat keputusan (SK) dalam jabatannya. Penandatanganan SK bagi staf sebutnya bisa hanya ditandatangani pejabat asisten.

Dengan demikian kata Asti, sebelum pejabat eselon 3 dan 4 dilantik, formasi staf masing-masing OPD sudah terbentuk, sehingga pelayanan OPD sudah bisa maksimal pada Februari nanti. ***